

ETOS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NU

R. Andi Irawan

Lakpesdam NU Pati, Jawa Tengah

r.andi_irawan@gmail.com

Abstrak

NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia. Keberhasilannya dalam mengemban misi dakwah di tengah masyarakat telah menjadi bukti bahwa NU adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam dinamika sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Namun di balik kesuksesannya dalam dimensi sosio-religius itu ternyata berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Nahdliyin khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Meski secara prinsip keorganisasian NU sudah lama merumuskan konsep kesejahteraan ekonomi, akan tetapi secara praktis NU masih terkesan kurang memprioritaskan pemberdayaan dalam sektor ekonomi. Apalagi dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), strategi dan tindakan NU dalam mengemban amanat untuk meningkatkan kesejahteraan umat haruslah tepat. Ketepatan strategi dan tindakan yang dimaksud tentu tetap berlandaskan pada dimensi keagamaan yang jelas. Beberapa di antaranya sebagaimana dalam al-Qur'an yang menjunjung tinggi etos transformasi (Q.S. 16:125), etos kerja (Q.S. 9: 105), etos intelektual (Q.S. 48: 11), etos sosial (Q.S: 107:1-3), etos moral (Q.S. 87: 14-15) dan etos penghargaan (Q.S.99:7). Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk menelisik apa saja faktor penghambat yang menyebabkan NU terkesan lamban dalam peran peningkatan kesejahteraan hidup umat, sekaligus menyuguhkan strategi dan tindakan aplikatif yang jitu sebagai problem solving atas krisis multidimensi yang mendera masyarakat dewasa ini.

[NU is the largest Muslim organization in Indonesia. Its success in the mission of preaching in the community has become evident that NU can't be separated in the dynamics of the historical development of the Indonesian. But behind the success in socio-religious dimension it faces a problem about the Nahdliyin's economic welfare. Although the principle of organizational NU had long been formulating, but practically NU still less impressed prioritize empowerment in the economic sector. Moreover, in response to MEA (ASEAN Economic Community), a strategy and action NU in undertaking to improve the welfare of the people must be right. Appropriateness of strategies and actions is of course still based on a clear religious dimension. Some of them, as in the Qur'an that upholds the ethos of transformation (Q.S. 16: 125), work ethos (Q.S. 9: 105), intellectual ethos (Q.S. 48: 11), a social ethos (Q.S. 107: 1-3), moral ethos (Q.S. 87: 14-15) and the ethos of the award (Q.S. 99: 7). Therefore, this article is to search for any factors that cause sluggish NU impressed in the role of improving the welfare of people's lives, as well as presenting a strategy and action applicative sniper as problem solving on the multidimensional crisis that plague society today.]

Kata kunci: NU, Krisis Multidimensi, MEA, Pemberdayaan Ekonomi

Pendahuluan

Harus diakui bersama bahwa Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan yang sejak lahirnya telah banyak memberikan kontribusi signifikan terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Kemerdekaan dan terwujudnya Pancasila dan UUD 1945 merupakan wujud nyata atas kecintaan dan konsistensi NU dalam mewujudkan negara Indonesia.¹ Selain itu, dengan berpijak pada prinsip-prinsip Islam *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah*, *Khittab* NU, dan *Mabadi Khoiru Ummah*, NU telah berhasil memperlihatkan Islam *rahmatan lil'alamin* dan mendorong iklim yang kondusif untuk terciptanya kerukunan umat beragama.²

¹ Zainul Milal Bizawi, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Compass, 2014), h. 23.

² Mahrus El-Mawa dkk, *20 Tahun Perjalanan NU: Memberdayakan Warga NU*, Cet. I (Jakarta: Lakpesdam NU, 2005), h. 56.

Namun, keberhasilan NU dalam dimensi keagamaan selama ini tidak sebanding dengan keberhasilannya dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Walaupun secara keorganisasian, NU dilengkapi dengan lembaga-lembaga yang memiliki arah pengembangan ekonomi dan pengembangan sumberdaya manusia, tapi kenyataan di lapangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mendapatkan perhatian yang serius jika dibandingkan dengan program-program keagamaan. Karena itu, sudah saatnya menjelang usia satu abad NU melakukan evaluasi yang serius dan melakukan seleksi kader yang loyal dan militan, agar cita-cita NU sebagai organisasi sosial keagamaan dapat terealisasi secara sempurna, utamanya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam mengimplementasikan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat *Nabdliyin* tidaklah semudah yang dibayangkan. Diperlukan rumusan kerangka atau konsep pemberdayaan masyarakat yang berasaskan pada nilai-nilai keislamaan. Hal ini tentu membutuhkan kajian-kajian teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat ulama, bagaimana sejatinya konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang islami. Landasan keagamaan dalam implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan hal urgen sebab saat ini umat Islam dihadapkan pada praktik ekonomi global yang bersandarkan pada paham kapitalisme. Secara prinsipil kapitalisme hendak mewujudkan agenda liberalisasi ekonomi di semua sektor kehidupan.³

Saat ini tampaknya sudah terealisasi dengan datangnya MEA atau AFTA. Selain tantangan kapitalisme, umat Islam (NU) saat ini juga mengalami problem terkait melemahnya etos kerja masyarakat *Nabdliyin*. Fatalisme yang banyak dianut masyarakat menjadi paham ideologi yang menghambat peningkatan taraf perekonomian masyarakat. Dalam masalah ekonomi masyarakat masih banyak yang menyerahkan pada

³ Qodri A. Azizy, *Melawan Globalisasi*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 56.

takdir akibatnya etos kerja dan *spirit* dalam memajukan ekonomi umat menjadi lemah.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji landasan keagamaan terkait etos kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Landasan dan fondasi keagamaan tentu akan sangat penting sebagai nilai-nilai dasar yang akan mempengaruhi etos dan perilaku masyarakat sehingga diharapkan Islam (NU) mampu memberikan solusi atas problem ekonomi kontemporer. Nilai-nilai islami tersebut diharapkan mampu mempengaruhi perilaku dan menumbuhkan etos kerja masyarakat. NU ke depan secara serius seyogianya mampu meningkatkan dan menggerakkan agenda dan program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat *Nabdliyin* dan sudah seharusnya agenda ini menjadi agenda prioritas NU menjelang usia satu abadnya pada tahun 2026.

Islam dan Etos Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bangsa Indonesia sedang mengalami pelbagai krisis dalam beberapa aspek kehidupan. Salah satu problem yang akut adalah menyangkut persoalan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menghadapi era persaingan bebas atau pasar bebas, masyarakat *Nabdliyin* diharapkan mampu bersaing secara produktif, kreatif dan inovatif. Masyarakat saat ini bisa dikatakan belum siap menghadapi era persaingan bebas, disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih jauh dari kualitas memadai untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman globalisasi, dengan ciri utama persaingan dan pasar bebas. Rendahnya SDM mengakibatkan kemiskinan multidimensi: kemiskinan intelektual, kemiskinan sosial, kemiskinan metodologis dan kemiskinan ekonomis. Karena itulah, pemberdayaan ekonomi dan kemandirian masyarakat *Nabdliyin* perlu diintensifkan melalui pendidikan di pesantren dan sekolah, pendampingan masyarakat, pelatihan wiraswasta, lembaga pelatihan dan dalam bentuk program-program nyata lainnya.

Secara terminologis, pemberdayaan masyarakat berarti mentransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*), kelompok sosial (*jama'ah*) dan masyarakat (*ummah*). Menurut KH. Sahal Mahfudh terminologi pengembangan/pemberdayaan dan dakwah tidak jauh beda. Sebab keduanya adalah proses dari serangkaian kegiatan yang mengarah pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Keduanya sama-sama meningkatkan kesadaran dari berperilaku tidak baik menjadi berperilaku yang baik. Ia mendefinisikan dakwah/pemberdayaan dengan mengutip pendapat Syaikh Ali Mahfudh dalam kitabnya Hidayah al-Mursyidin: "Dakwah adalah mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk Allah, menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar ia bahagia di dunia dan akhirat".⁴

Definisi dakwah yang disampaikan Kiai Sahal Mahfudh di atas senada dengan pendapat Kiai M. Tholhah Hasan dengan mengutip pendapat Sayid Sabiq dalam kitabnya *Da'watu Al-Islam*. Menurutnya, *dahwah*/pemberdayaan Islam pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memengaruhi dan mengajak orang baik individu maupun kelompok dengan berbagai macam cara, media dan sarana yang sah dan tepat, agar mampu menempuh jalan hidup yang benar, dalam menuju kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁵

Gerakan pemberdayaan masyarakat secara umum, terutama dalam hal ekonomi dapat didasarkan pada nilai-nilai ajaran al-Qur'an yang menjunjung tinggi etos, termasuk etos transformasi, etos kerja, etos intelektual dan etos sosial.⁶

1. Etos Intelektual. Allah berfirman: "*Allah mengangkat orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian...*" (Q.S. 48: 11)

⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, Cet. II (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 97.

⁵ M. Tholhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Cet. III (Jakarta: Lantabora Press, 2003), h. 192.

⁶ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmadi Syafie, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, Cet. I (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 28.

2. Etos Sosial: Allah berfirman: *“Tabukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Mereka adalah yang menelantarkan anak yatim dan orang-orang yang tidak berjuang menjejahterakan orang miskin”*. (Q.S: 107:1-3)

3. Etos Moral. Allah berfirman: *“Sungguh bahagialah orang-orang yang mensucikan dan mengingat nama Tuhannya”*. (Q.S. 87: 14-15)

4. Etos Belajar. Allah berfirman: *“Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu (tidak belajar)...?”*. (Q.S. 39: 9). Di ayat lain, Allah berfirman: *“Bacalah dengan Nama Tuhanmu yang menciptakan...”* (Q.S. 96:1-2).

5. Etos Bekerja. Allah berfirman: *“Bekerjalah. Segera Allah dan Rasul-Nya dan seluruh umat yang beriman akan melihat hasil karyamu”* (Q.S. 9: 105).

6. Etos transformasi dan metodologis. Allah berfirman: *“Transformasikanlah mereka ke jalan Tuhanmu dengan penuh kearifan, supermotivasi positif, dan sanggahlah mereka dengan cara-cara yang lebih metodologis.”* (Q.S. 16:125)

7. Etos Penghargaan. Allah berfirman: *“Siapa yang berkarya baik, seberat zarah sekalipun, pasti akan menyaksikan balasannya”*. (Q.S.99:7)

Menanggapi masalah etos kerja, KH. Tholhah Hasan mengidentifikasi bahwa di dalam al-Qur’an terdapat 360 ayat yang berbicara tentang *“al-amal”*, 109 ayat tentang *“al-fi’l”*, 67 ayat tentang *“al-Kasb”*, dan 30 ayat tentang *“As-Sa’yu”*. Semua ayat-ayat tersebut mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kerja, menetapkan sikap-sikap terhadap pekerjaan, memberi arahan dan motivasi, bahkan contoh-contoh konkret tanggung jawab kerja. Islam memandang bekerja sebagai hal yang luhur dan bahkan menemukannya sebagai salah satu wujud ibadah, selama niatnya benar dan praktiknya tidak menyalahi aturan Allah. Islam juga memberi motivasi dan rangsangan yang kuat kepada orang yang suka kerja dengan baik, bukan hanya dengan keuntungan dunia tetapi juga pahala akhirat. Dan Islam sejak awal pertumbuhannya, sudah membina lingkungan sosio-kultural yang

“cipta kerja” sebagai bagian dari perintah agama.⁷

Dari ayat-ayat di atas terutama dalam surat *Al-Ma'un*, menunjukkan bahwa Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sesuai dengan paradigma Islam sebagai agama gerakan dan perubahan, sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur'an, surat *Al-Ra'du*, ayat 11. Menurut Agus Efendi wilayah pemberdayaan umat yang harus digarap saat ini meliputi tiga hal, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual dan ekonomi.

Agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berhasil, Kiai Sahal memberikan memberikan panduan terkait dengan langkah-langkah strategis. *Pertama*, menentukan sasaran pemberdayaan. Dalam langkah pertama ini, kebutuhan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan harus diidentifikasi terlebih dahulu, baik kebutuhan yang bermanfaat untuk jangka pendek, maupun untuk jangka panjang. *Kedua*, menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan sasaran. *Ketiga*, menentukan strategi pemberdayaan yang matang guna tercapainya tujuan. *Keempat*, membuat perencanaan yang matang. *Kelima*, menggunakan pendekatan partisipatif dalam proses pemberdayaan masyarakat.⁸ Melalui penjelasan ini, masyarakat NU diharapkan mampu menumbuhkan etos belajar, etos bekerja, etos transformasi, etos sosial dan moralnya, serta melakukan program-program pemberdayaan ekonomi yang nyata sehingga ke depan dapat melakukan transformasi dan kemajuan dalam terutama ekonomi.

‘Adl, Ihsan, dan Shadaqoh sebagai Prinsip Pemberdayaan Ekonomi NU

Di tengah kehidupan global yang menjadikan ekonomi sebagai fondasi kehidupan, masyarakat *Nabdliyin* perlu mendapat pencerahan, arahan dan landasan tentang praktik perekonomian yang islami. Hal ini

⁷ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia*, Cet. IV (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 238-244.

⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*..., h. 104.

penting agar semua aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dan sejalan dengan ajaran al-Qur'an sehingga aktivitas perekonomian yang dilakukan secara agama dapat dikatakan sah dan mendapat rida Allah Swt.

Menurut Asghar Ali Engineer, konsep ekonomi Islam didasarkan pada dua prinsip, yaitu *'adl* dan *ihsan*. Kedua prinsip ini disarikan dari ayat al-Qur'an surat Al-Muthaffin, ayat 1-6:

Artinya: "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"

Ayat di atas membimbing masyarakat *Nahdliyin* untuk jujur dengan sungguh-sungguh dalam melakukan transaksi dengan orang lain dan memberi hukuman berat bagi yang mengeksploitasi orang lain. Al-Qur'an memberikan kepada kita konsep masyarakat yang adil dan bebas dari eksploitasi. Dari sini tampak aspek transendental ajaran Islam sepanjang menyangkut prinsip-prinsip ekonomi. Transaksi apa pun yang berkaitan dengan masalah produksi maupun perdagangan, harus dilakukan secara adil, bebas dari eksploitasi dan berdasarkan semangat kebajikan.

Asghar Ali Engineer melanjutkan bahwa prinsip *'adl* dan *ihsan* tidak akan terealisasi jika adanya pemusatan kekayaan. Al-Qur'an mengutuk keras praktik penimbunan dan pemusatan kekayaan. Hal ini digambarkan al-Qur'an dalam surat Al-Humazah, ayat 1-4:

Artinya: "Celakalah bagi setiap pengumpul lagi pecelaka, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya; ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya; sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah."

Ayat di atas secara tegas memperingatkan orang-orang yang hobi mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri. Tidak pernah bersedekah atau membantu kesusahan ekonomi orang lain. Karena itu, al-Qur'an memberikan prinsip sedekah untuk terjadinya kesejahteraan dan keadilan sosial dan hilangnya kesenjangan ekonomi masyarakat. Dan

sahabat Abu Dzar Al-Ghifari sering mengutip hadis Nabi Saw: “Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnannya di jalan Allah, peringatkanlah mereka dengan azab yang pedih”. Dalam surat Al-Baqarah, ayat 219, al-Qur’an juga menyeru masyarakat beriman agar menafkahkan harta yang melebihi keperluan-keperluan mereka: “...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.””⁹

Prinsip ‘*adl* dan ‘*ihسان* yang direalisasikan dengan praktik sedekah (tidak adanya pemusatan harta) secara mendasar dan filosofis bertentangan dengan konsep ekonomi kapitalisme. Kapitalisme menggiring kelompok-kelompok monopoli yang sangat kuat dalam pemusatan kekayaan, yang dikuasai oleh masyarakat pemodal. Kebebasan individu dalam meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dilegalkan, ditambah persaingan atau kompetisi bebas tanpa batas terjadi sangat keras. Praktik ekonomi demikian tidak akan mampu merealisasikan keadilan dan kesejahteraan sosial, tapi justru akan mempertajam jurang kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Berbicara tentang ekonomi kapitalis biasanya merujuk pada teori Adam Smith yang menyatakan bahwa inti dari pasar bebas adalah setiap individu diberi hak untuk mengejar kepentingannya.¹⁰

Dalam konteks ini, Gus Dur juga berpendapat bahwa praktik ekonomi Islam harus mengandung nilai-nilai moralitas dan diorientasikan demi mewujudkan keadilan sosial untuk memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak.¹¹ Dan jika kita cermati, prinsip-prinsip di atas juga sejalan dengan nilai-nilai *Mabadi Khoitu Ummah*, yaitu *as-Sidqu* (kejujuran), *al-Wafa bil-‘Abdi* (komitmen/disiplin), *al-‘Adalah* (keadilan), *al-Istiqomah* (konsisten), *ta’awun* (saling tolong menolong) dan

⁹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, Cet. II (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 62-65.

¹⁰ Qodri A. Azizy, *Melawan Globalisasi...*, h. 45.

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Cet. II (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. 164.

al-Amanah (dapat dipercaya).¹²

Mabadi Khoirul Ummah dirumuskan pada Muktamar NU ke-13 di Magelang 1939 sebagai landasan moral bagi gerakan ekonomi kaum santri, khususnya kaum *Nabdliyin*.¹³

Demikianlah Islam memerintah umatnya agar mengimplementasikan prinsip ‘*adl, ibsan dan shadaqoh* dalam aktivitas membangun ekonominya, agar terjadinya keseimbangan struktur ekonomi masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial. Kekayaan tidak akan dinikmati oleh mereka yang kaya karena monopoli dan pemusatan kekayaan dalam pandangan Islam harus dihapus dalam praktik ekonomi.

Ekonomi sebagai Basis Gerakan NU

Menjelang usia satu abad, NU memiliki garapan dan agenda pekerjaan rumah yang cukup banyak. Mulai dari penataan manajemen organisasi, konsolidasi kaderisasi hingga bagaimana menghadapi isu dan gerakan-gerakan radikalisme serta bagaimana memaksimalkan peran dan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat *Nabdliyin*.

Saat ini warga NU menjadi kaum mayoritas di Indonesia yang berada di daerah pedesaan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di pedesaan maka secara otomatis warga miskin Indonesia yang paling dominan secara kuantitas adalah warga NU. Karena itulah, NU seyogianya segera melakukan konsolidasi menyangkut program pemberdayaan ekonomi. Agenda ini tidak bisa ditunda-tunda sebab kondisi sosio-ekonomi masyarakat semakin terpuruk dan terancam memburuk dengan krisis global yang terjadi dan dibukanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan AFTA.

Semangat gerakan pemberdayaan ekonomi tersebut dapat kita petik

¹² Soeleiman Fadeli, *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswab NU*, Cet. III (Surabaya: Khalista, 2010), h. 76. Baca juga buku karya, Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nabdlatul Ulama*, Cet. I (Surabaya: Khalista, 2004), h. 43.

¹³ Tashwirul Afkar, *Ekonomi NU: Mengembalikan Spirit Nabdlatul Tujjar*, Edisi No. 28 Tahun 2009 (Jakarta: Lakpesdam NU, 2009), h. 20.

dari organisasi Nahdlatu al-Tujjar (NT) yang berdiri pada tahun 1918, jauh sebelum NU lahir. Organisasi ini diprakarsai oleh 45 saudagar santri yang berada di tiga jalur strategis, yaitu Surabaya, Kediri dan Jombang. Organisasi ini lahir didorong oleh empat kondisi. *Pertama*, pada saat itu banyak masyarakat, bahkan ulama yang memiliki pandangan hidup tawakal (*tajrid*) tanpa berikhtiar untuk memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik. *Kedua*, NT lahir juga disebabkan serangan kaum modernis (Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad) terhadap kantong-kantong NU. *Ketiga*, NT lahir sebagai reaksi para ulama yang bangkit menentang pergerakan ekonomi kaum penjajah Belanda. Semangat yang muncul adalah membentengi perekonomian rakyat sebagai tulang punggung bangsa. *Keempat*, kesadaran ekonomi yang muncul saat itu lebih cenderung mempresentasikan kesadaran ekonomi sub sistem karena tujuan yang diraih adalah agar kebutuhan reproduksi pengetahuan lewat proses pembelajaran di dalam pesantren dapat terpenuhi.¹⁴

Berangkat dari sejarah NT, NU dan warga *Nabdliyin* sudah seharusnya terpanggil untuk menjadikan ekonomi sebagai basis gerakan. Dilihat dari sejarah dan prinsip-prinsip *Mabadi Khoirul Ummah*, NU telah memberikan landasan yang kuat bagi dirinya dan warganya untuk melakukan gerakan ekonomi secara massif di berbagai sektor. Saat ini peluang ekonomi sangat luas karena banyaknya sektor yang bisa dimasuki, maupun peluang pasar bebas yang telah dibuka. Dalam konteks ini pula NU melakukan gerakan ekonomi sebagai aksi melawan praktik ekonomi kapitalis dan mencerahkan warganya yang masih dalam pandangan hidup *tajrid*.

Kesimpulan

Saat ini warga *Nabdliyin* dihadapkan pada beberapa persoalan yang tidak kecil. Dalam sektor ekonomi dihadapkan pada dua realitas. *Pertama*, sebagian masyarakat yang masih memiliki pandangan hidup

¹⁴ Tashwirul Afkar, *Ekonomi NU: Mengembalikan Spirit...*, h. 7-11.

tajrid sehingga tidak memiliki etos kerja yang tinggi dalam meningkatkan perekonomiannya.

Kedua, praktik ekonomi kapitalis yang didasarkan pada kompetisi dan pasar bebas. Karena itu, sudah saatnya bagi NU dan warganya menjelang usia satu abad melakukan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara masif menumbuhkan etos kerja masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi ekonominya. Pemberdayaan dan praktik ekonomi yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip ‘*adl, ihsan* dan *shadaqoh*, serta senyawa dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam *Mabadi Khoirul Ummah*. Dengan demikian kemandirian ekonomi warga NU dapat tercapai dan senantiasa dalam bingkai ajaran Islam yang diridai Allah Swt. *Waallahu a’lam bi al-Shawab*.

Daftar Pustaka

- Azizy, A. Qodri, *Melawan Globalisasi*, Cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Afkar, Tashwirul, *Ekonomi NU: Mengembalikan Spirit Nabdlatut Tujjar*, Edisi No. 28 Tahun 2009, Jakarta: Lakpesdam NU, 2009.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Fadeli, Soeleiman, *Antologi Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah NU*, Cet. III, Surabaya: Khalista, 2010.
- Hasan, M. Thalbah, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Cet. III, Jakarta: Lantabora Press, 2003.
- _____, *Islam dan Masalah Sumberdaya Manusia*, Cet. IV, Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nabdlatul Ulama*, Cet. I, Surabaya: Khalista, 2004.
- Bizawi, Zainul Milal, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Kompas, 2014.
- El-Mawa, Mahrus, dkk, *20 Tahun Perjalanan NU: Memberdayakan Warga NU*, Cet. I, Jakarta: Lakpesdam NU, 2005.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Machendrawaty, Nanih dan Syafie, Agus Ahmadi, *Pengembangan Masyarakat Islam: dari Ideologi, Strategi, Sampai Tradisi*, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Cet. II, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

R. Andi Irawan: *Etos Pemberdayaan Ekonomi*.....